

## **Separatisme di Asia Tenggara: Antara Penguasa dan Gerakan Nasionalis Kelompok Minoritas**

Khairu Roojiqien Sobandi

### *Abstract*

*This paper examine the existence of separatism in Southeast Asia, specifically, the interactions between state approaches in dealing with nationalist movements. The question is on how the identity of the Pattani Southern Thailand, Acehnese in Indonesia and Moro in the Philippines created and how state approaches contend with the movements. The aims of this paper are explaining these movements' identity creation through historical experiences over centuries, and state approaches challenge the movements. The result shows that Moros' and Acehnese identity formed through their conflicting historical journeys with kolonialists. However, Pattani identity constructed through history of Buddhist rulers that also full of conflicts with Thai Muslim society. The values that referred on these three communities basically are ethno-nationalist shared with Islamic values. These communities are facing state repressions through military and bureaucracy policies, which only meet dead ends by the existence of conflicts. Pattani movement oppressed by Budhist Thailand acted discriminatively on Muslim community because of politics of differences of ethno-religion. The Thai rulers label Pattani as Islamic terrorist group. Likewise, the Philippines' governerment fuels conflicts by demonizing Moros as same as Abu Sayyaf terrorist group. The Indonesian government did on the other side of the coin, which is not to demonize Acehnese as terrorist group when they have chance to did so and even after tsunami in 2004, they manage Helsinki agreement in 2005. It suggested that these three governments use multicultural nation approaches in dealing with the movements, which accommodate pluralist and multicultural identities on a more equal position.*

### **Pengantar**

Tulisan ini menganalisis dan menjelaskan gerakan-gerakan separatisme di Asia Tenggara, khususnya gerakan separatisme di Thailand, Filipina, dan Indonesia. Argumen penelitian ini adalah bahwa dinamika dan separatisme di Asia Tenggara merupakan hasil dari proses dinamika hubungan ketiga gerakan separatisme ini dengan penguasa (para kolonialis dan pemerintah nasional di ketiga negara tersebut). Oleh karena itu, dinamika gerakan separatisme di Asia Tenggara ini terjadi karena adanya interaksi antara

penguasa dan gerakan separatisme yang mana penguasa lebih banyak menggunakan pendekatan negara terhadap mereka.

Para penguasa menggunakan pendekatan yang berbeda-beda dengan tujuan untuk mempertahankan keutuhan wilayahnya ke dalam satu negara-bangsa. Pemerintah Filipina, Thailand, dan Indonesia menggunakan pendekatan militeristik dalam mengatasi permasalahan gerakan-gerakan separatisme ini. Namun, pada akhirnya, pemerintah Filipina, Thailand dan Indonesia ini hanya menemukan jalan buntu. Anehnya, ketiga pemerintah nasional ini masih berpikir bahwa tindakan-tindakan militeristik masih dianggap sebagai cara yang efektif untuk berhadapan dengan gerakan-gerakan separatisme yang ada dalam negaranya. Tindakan ini sangatlah mirip dengan apa yang terjadi pada perjalanan sejarah gerakan nasionalis tersebut ketika para penguasa kolonial yang juga sering menggunakan aparat negara untuk mematikan gerakan-gerakan pemberontakan. Pendekatan negara dengan menggunakan militer sebagai aparat negara terus dilanjutkan oleh pemerintah di negara-negara Asia Tenggara tersebut. Sebagai contoh, gerakan separatisme Moro yang digeneralisir dan diidentifikasi oleh pemerintah Filipina sebagai gerakan teroris seperti kelompok Abu Sayyaf yang dengan mudah disederhanakan permasalahannya, sehingga pemerintah Filipina menggunakan pendekatan militer atas nama keamanan negara (Dangzlan, 2006).

### **Problematika Politik Identitas**

Akhir-akhir ini tampaknya persoalan identitas menjadi suatu hal yang penting baik bagi individu ataupun berbagai kelompok. Secara sosiologis, identitas didefinisikan sebagai pengalaman manusia melalui sejarah secara geografis, ingatan kolektif, imajinasi personal, instrumen kekuasaan, dan wahyu religius. Identitas menciptakan pengertian melalui pengalaman-pengalaman kolektif. Pada konteks ini, Manuel Castells berpendapat ada bermacam-macam atribut budaya dari identitas sehingga mendorong orang membuat prioritas atas atribut budaya di sekitar mereka. Ketika orang membuat prioritas berbeda, mereka cenderung untuk berkonflik satu sama lainnya (Castells, 1997: 6-7).

V. K. Korostelina berpendapat bahwa adanya identitas sosial mencegah orang dari ancaman konflik interpersonal dengan menyediakan perlindungan bagi sebuah kelompok dengan ruang yang sama. Pembentukan identitas merupakan hasil dari identifikasi yang melibatkan proses sosialisasi, nilai bersama, kepercayaan, harapan, norma, dan sebagainya. Identitas adalah sebuah struktur dengan interelasi kompleks diantara sub-identitas yang berbeda-beda. Ada empat komponen yang mencirikan identitas sistemik, yaitu: (1) sebagai bagian dari kelas atau tipe yang mendefinisikan kerutinitasan dari fungsi dan perkembangannya; (2) sebagai sebuah sistem yang mempunyai

karakteristik khusus; (3) sebagai seperangkat sub-sistem yang berpengaruh kepada fungsi-fungsinya; dan (4) dengan interaksi eksternalnya dalam proses mengembangkan dan menyelesaikan konflik sosial (2007: 31-32).

Secara spesifik, Korostelina menunjuk identitas dalam konteks untuk menjelaskan hubungan antara identitas dan konflik yang utamanya terjadi karena adanya prasangka antar kelompok. Prasangka diukur dengan menggunakan skala yang terstandarisasi yang berisikan pernyataan mengenai atribut kelompok, perasaan terhadap kelompok, dan dukungan terhadap kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi mereka. Dalam konteks ini, stereotipe merupakan bagian dari prasangka yang digunakan untuk menciptakan anggapan terhadap kelompok luar yang biasanya sebagai musuh. Oleh karena itu, prasangka merupakan atribut negatif, antipati berdasarkan kesalahan, dan kekakuan dari generalisasi (2007: 127-131). Identitas dapat menciptakan konflik dalam keadaan adanya prasangka antar kelompok dari satu kelompok terhadap kelompok lainnya. Prasangka dapat dengan sangat mudah muncul karena kurangnya informasi, komitmen yang dapat dipercaya, dan dilema keamanan dengan kelompok-kelompok lain.

Korostelina menyebutkan bahwa identitas yang dominan ada dalam bentuk identitas kolektif yang dimobilisasi dan mempunyai ideologi. Karena itu, kelompok sendiri (*in-group*) mengartikan mereka sendiri sebagai pihak yang positif dan kelompok luar (*out-group*) sebagai pihak yang negatif. Lebih jauh, bertarung dengan kelompok luar dilihat sebagai sesuatu yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup kelompok sendiri (*in-group*) (2007:146-153). Institusi dominan dapat dan seringkali mengkonstruksi identitas. Orang Spanyol, sebagai kolonialis yang menguasai Filipina, menggunakan kata 'Moro' secara negatif dengan tujuan untuk mengingatkan pada bangsa Moor yang muslim di Eropa. Orang Spanyol memiliki pengalaman pahit perang salib Iberian melawan bangsa Moor yang membawa orang Spanyol mengidentifikasi orang muslim di daerah ini sebagai musuh (Man, 1990: 22).

Sebagai institusi dominan, para penguasa kolonialis atau bekas kolonialis, menggunakan identitas untuk memperluas dominasi mereka dalam berhadapan dengan aktor-aktor lainnya. Misalnya, orang Aceh diidentifikasi sebagai pemberontak oleh pemerintah pusat Indonesia dengan tujuan untuk memperluas dominasi kekuasaan atas nama satu negara-bangsa Republik Indonesia. Gagasan negara-bangsa Republik Indonesia menjustifikasi kebijakan pemerintah pusat Indonesia melalui militer sebagai aparat negara untuk menghilangkan bangsa orang Aceh.

Pada poin ini, Castells menemukan bahwa konstruksi identitas selalu dalam konteks hubungan kekuasaan. Dia mengajukan tiga bentuk identitas, ketiga bentuk identitas ini sangatlah tergantung pada konteks sosialnya, yaitu: (1) *legitimizing identity*, (2) *resistance identity*, dan (3) *the project identity* (1997: 7-10). *Legitimizing identity* adalah identitas yang dibentuk oleh institusi-institusi

masyarakat dominan dengan tujuan untuk memperluas dan merasionalisasi dominasi mereka dalam menghadapi aktor-aktor sosial lainnya. Pendek kata, identitas merupakan bentuk perlawanan yang dapat menyokong rencana, melalui perjalanan sejarah, menjadi identitas dominan dalam institusi masyarakat, sehingga terbentuklah *legitimizing identity* untuk merasionalisasi dominasi mereka.

Tipe kedua adalah *resistance identity*. *Resistance identity* adalah identitas kolektif untuk melawan penindasan. Sejarah, geografi, dan biologi merupakan landasan fundamental dari perlawanan. Contohnya, Orang Aceh menggunakan nasionalisme etnis untuk menginternalisasi nilai-nilai dalam masyarakat Aceh. Bagi orang Aceh, batasan perlawanan menjadi penting, yaitu melalui sejarah dan geografi yang berbeda dengan sebagian besar wilayah geografis dan sejarah Indonesia. Karena itu, politik perbedaan ini digunakan oleh penguasa untuk memberikan label identitas orang Aceh yang sangat berbeda dari identitas nasional Indonesia sehingga muncul klaim bahwa pembetulan label ini merupakan bentuk penyingkiran orang Aceh dari identitas nasional Indonesia. Sebagai contoh, gambaran identitas orang Aceh, pada masa rejim Soeharto khususnya, berada dalam kungkungan pihak yang dominan yaitu pemerintahan nasional yang didominasi orang Jawa dan militernya (Aspinall, 2007: 258). Oleh karena itu, dominasi pemerintahan nasional tersebut menjustifikasi gerakan orang Aceh untuk meyakinkan komunitas orang Aceh bahwa mereka harus memberontak pemerintah nasional yang didominasi orang Jawa.

Tipe identitas ketiga adalah *project identity*. Castells menyatakan, "... ketika aktor-aktor sosial, atas dasar materi kultural yang manapun itu tersedia bagi mereka, membangun identitas baru yang mendefinisikan ulang posisi mereka dalam masyarakat dan dengan melakukan itu, mereka mencari perubahan struktur sosial secara keseluruhan" (Castells, 1997: 8). Misalnya saja, Manuel Castells menganalisis mengenai perlawanan feminisme dari identitas perempuan dan hak perempuan dalam melawan nilai-nilai keluarga yang patriarkis. Identitas ini telah merubah nilai-nilai dan kepercayaannya dalam masyarakat secara keseluruhan dalam melihat pentingnya identitas perempuan dan persamaan hak perempuan dengan laki-laki dalam masyarakat.

Selain tiga bentuk di atas, identitas juga berhubungan dengan ideologi. Dalam konteks ini, Malesevic mengemukakan konsep identitarianisme yang diklaim sebagai payung istilah untuk semua yang berhubungan dengan identitas. Identitas seringkali menjadi alat yang ampuh untuk membenaran ideologi ketidaksetaraan politik. Identitas hampir menjadi sesuatu yang bersifat universal dan yang memperlihatkan popularitas, memperlihatkan normalitas, dan penerimaan umum adalah isi yang berhubungan erat dengan kekuatan ideologi. Ia berargumen bahwa identitas nasional yang menggunakan ideologi tertentu tersebut seringkali dilembagakan oleh

struktur negara modern yang kuat, cenderung untuk memperkuat pandangan kelompok dominan atas realitas sosial dan bentuk-bentuk diskriminatif dari dominasi (Malesevic, 2006: 23-36).

Radhakrishnan (1993) menambahkan bahwa identitas adalah merupakan ukuran normatif yang mentotalkan keberagaman 'diri' dan 'subjektifitas' dan kewarganegaraan normatif dari identitas manapun dengan legitimasi sejarah yang merupakan dampak ideologis identitas utuh dan tidak terbagi dari rejim. *Gerrymandering* politik atas heterogenitas masyarakat dengan menjadikan negara bangsa sebagai tujuan kontrol dan dominasi yang sayangnya menciptakan gangguan-gangguan dalam jangka panjang yang pada akhirnya menuju fase nasionalis atau post-kolonial. Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa identitas merupakan permasalahan pilihan, relevansi, dan perasaan kebenaran. Pendek kata, persoalan identitas merupakan pilihan yang terbentuk dan diterima oleh suatu komunitas tertentu karena adanya faktor eksternal dan internal. Dengan dimilikinya identitas tertentu pada suatu komunitas berimplikasi pada dianutnya suatu ideologi tertentu yang mempunyai konsekuensi politik. Hal ini akan di elaborasi lebih jauh dalam pembahasan artikel ini.

## **Identitas Orang Pattani, Moro dan Aceh**

### **1. Orang Pattani**

Orang Muslim di selatan Thailand secara mayoritas adalah etnis Melayu dan lebih sering berbicara bahasa Melayu daripada bahasa Thai. Mereka dahulu merupakan dari bagian tersendiri sebagai kesultanan Pattani yang independen, yang di masa sekarang ini menjadi salah satu provinsi negara Thailand yang terdiri atas komunitas Pattani, Yala, Narathiwat, dan merupakan bagian dari Songkhla barat yang berkembang pada tahun 1390 sampai dengan 1902. Sejarah tersebut merupakan entitas politik yang terpisah dan mereka berstatuskan kelas kedua dan merupakan pengabaian secara politis atas kaum minoritas Melayu sejak berdirinya negara Thailand yang terus menerus berkonflik dan melakukan berbagai tindakan kekerasan.

Pada tahun 1902, Siam, yang sekarang menjadi Thailand, secara formal merupakan kesultanan yang berdasarkan perjanjian pada tahun 1909 yang membatasi antara Pattani dan Kelantan, Perak, Kedah, dan Perlis (Malaysia) Melayu. Perlakuan secara administratif paksaan negara Thailand melalui perubahan reformasinya membuat penguasa Patani terbagi-bagi dalam tiga kesultanan yaitu Patani, Yala, dan Narathiwat (Yegar, 2002). Aristokrasi lokal berlangsung di daerah-daerah ini yang secara resmi mereka harus berbahasa Thai dan harus melapor secara eksklusif dan secara langsung pada pusat Thailand, Bangkok.

Selama hampir 20 abad, hubungan antara Bangkok dan mayoritas muslim di propinsi bagian selatan bercirikan kebijakan asimilasi yang

dipaksakan dan bentuk penolakan, sehingga pengimplementasian kebijakan ini sering menimbulkan ketegangan. Resistensi paling kuat muncul ketika pemerintah berusaha melakukan penghancuran kekuatan struktur lokal dengan alasan kebijakan asimilasi yang dianggap oleh komunitas lokal membahayakan dan mengancam Islam dan budaya Melayu.

Salah satu sumber resistensi terhadap pemerintah nasional Thailand adalah penghapusan ponoh/pondok (sekolah keagamaan), institusi ini merupakan institusi yang sangat penting yang mempertahankan identitas Muslim Melayu. Ketika penguasa Thai mengganti elit tradisional dengan orang Budha beretnis Thai, kepala guru (Tok Guru) menjadi pemimpin komunitas secara faktual, penjaga keyakinan, pengangkat identitas Melayu. Alhasil munculah gerakan perlawanan yang mengusung identitas politik tandingan terhadap penguasa Budha Thailand dengan adanya organisasi gerakan orang Pattani seperti PULO dan BRN.

## **2. Identitas Politik Orang Moro**

Kata 'Moro' sebenarnya berkonotasi negatif yang ditujukan pada para penganut Muslim di daerah Mindanao. Hal ini bisa ditelusuri dengan adanya Suku Moor yang menentang Spanyol dengan orang Muslim di semenanjung Iberian Eropa (Man, 1990: 22). Namun, pada masa kepemimpinan Nur Misuari dan kawan-kawannya, terminologi Moor (Moro) sebenarnya merupakan perjuangan gerakan etno-nasionalis melawan orang Filipina Kristen imperialis yang dipimpin oleh birokrasi pusat Manila dan para elit militernya (McKenna, 1998). Para separatis yang berlandung dengan bendera Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) mendapatkan dukungan secara popular oleh orang-orang Muslim (Man, 1990: 77).

Terminologi Moro merupakan konstruksi konfigurasi yang problematik, tetapi ini telah mendorong mereka yang mempunyai ikatan yang sama menjadi lebih kuat dengan kekuatan militer dan berperang dalam bentuk militer konvensional dengan Manila (McKenna, 1998). Beberapa studi mengenai etno-nasionalisme berpendapat bahwa 'Perang Moro' (Yegar, 2002) merupakan pemanasan budaya dimana perbedaan budaya di antara kelompok-kelompok Muslim diabaikan, membentuk sebuah identitas budaya yang sama. Sedangkan studi lainnya berpendapat sebaliknya, di mana sebenarnya kelompok-kelompok Muslim di Filipina mempunyai orientasi yang beragam dan sama sekali tidak mempunyai kesamaan budaya. Dalam konteks ini, kita tidak seharusnya tidak terjebak dalam reduksi historis dengan secara eksklusif melacak Perang Moro sebagai sebuah pengalaman yang sama diantara kelompok-kelompok yang berbeda. McKenna (1998) memperlakukan mitos nasionalisme Moro dengan mengeksplorasi perbedaan pandangan tersebut dengan cara mengamati politik keseharian dan doktrin perlawanan nasionalis oleh orang-orang biasa.

Secara historis, orang-orang Spanyol Filipina Kristen melihat dengan rendahnya atas apa yang mereka sebut tata cara memperlakukan Orang Moro dengan buruk. Hal ini diterima oleh orang-orang Spanyol tersebut bahwa perdamaian dan hubungan yang baik tidak dapat dilakukan di antara mereka dan orang-orang Moro seperti kurangnya sistem kodifikasi hukum, menyebut kaum Moro dengan standar hukum yang rendah. Hal ini mengintensifkan panggilan keberadaan militer yang kuat di Mindanao sebagai sebuah kebutuhan dalam rangka menurunkan ancaman-ancaman dari pembajakan yang mengganggu di sekitar lautan Filipina (George, 1980; Yegar, 2002).

Setelah Penjajah Spanyol, Orang Amerika Serikat datang mengkolonisasi dan para sejarawan memandang kedatangan orang Amerika ini sebagai pemecah dalam pembentukan nasionalitas orang Moro. Kekalahan kolonial Spanyol dalam perang antara Spanyol-Amerika yang berakhir dengan penandatanganan perjanjian di Paris yang ditandai oleh penyerahan daerah koloni Spanyol kepada pemerintah Amerika Serikat dengan kompensasi yang relatif kecil. Kedatangan kolonial Amerika menandakan penurunan 'kedaulatan' Moro di daerah Mindanao. Ekspansi instrumen negara mensyaratkan pengontrolan dengan sangat ketat kepada yang diperintahnya. Apa yang menarik adalah adanya kesamaan kerangka pikir yang digunakan juga nantinya oleh mereka yang berargumen untuk apa yang mereka sebut sebagai 'Bangsa Moro' (Man, 1990: 22).

Perdebatan mengenai bangsa Moro tidak dapat dilakukan tanpa memperbincangkan sejarah nasionalisme Filipina yang satu sama lain terkait dengan kompleks. Dengan semakin membesarnya panggilan untuk merdeka, dan hal ini tidak bisa terhindarkan lagi, Manila menjadi lebih percaya diri memerdekakan diri. Sebuah kemenangan telah dicetak melalui Perjanjian (*Jones Act*), yang 'memfilipinisasi' birokrasi dan karena itu mendorong mesin-mesin nasionalisasi menuju pada jalan kemerdekaan. Bersamaan dengan ini datangnya tuntutan dari Manuel Quezon dan para pengikutnya untuk segera mengintegrasikan Tanah Moro (Moroland) kepada daerah Filipina yang secara geopolitik lebih besar (George, 1980: 80-86).

Konsekuensinya, kedatangan migrasi orang Filipinos membanjiri Cotabato dan Davao yang mendorong terdislokasinya para penduduk lokal di Mindanao (Abinales, 2000 dalam Dangzalan, 2006). Ketika banyak yang berusaha untuk menjelaskan meletusnya 'permasalahan Moro' dalam konteks terbelahnya etnisitas dan perbedaan dengan orang Kristen Filipinos (Abinales, 2000 dalam Dangzalan, 2006), memberikan pandangan dari dalam dengan menarik tentang bagaimana penyesuaian institusional dan rekonstruksi yang menuju pada munculnya krisis Moro ini. Abinales melakukan penelitian dari dalam ini dengan menjelaskan konsesi mutual antara para pemimpin Manila dan daerah pinggirannya. Setelah negosiasi dalam perjanjian cukup

berimbang, Quezon dan para pengikutnya merusak perjanjian ini, sehingga menghilangkan lebih jauh lagi yang termarginalisasi tersebut dengan jalan mensentralisasikan birokrasi pemerintah (George, 1980; Man, 1990; Yegar, 2002).

Tentu saja, asumsi yang digarisbawahi adalah bahwa adanya sebuah negara bangsa Filipinos yang telah terbentuk melalui sejarah dengan berbagai macam aktor yang mengklaim adanya nasionalitas. Pada intinya, kajian ini ingin menunjukkan pernyataan sebagaimana yang sudah dinyatakan oleh banyak sejarawan di masa lalu berkaitan dengan nasionalitas Filipina. Nasionalitas di Filipina merupakan konstruksi yang sebagian besar berpijak kepada kerangka para kolonial yang telah ditinggalkan para kolonialis, yaitu Filipina yang merupakan negara penerus kedaulatan kolonial (George, 1980; Man, 1990; Yegar, 2002).

Lebih jauh lagi, Samuel K. Tan (dalam Premdas *et. al.*, ed., 1990) menyatakan bahwa dalam literatur etnis, orang Moro berubah dari satu konfigurasi nilai kepada konfigurasi nilai yang lainnya dan yang sama adalah berjalan melalui keberagaman. Komunitas Moro mempunyai epik etnis yang memotret kepahlawanan orang Moro dalam memerangi ketidakadilan para kolonialis. Nilai-nilai Islami sangatlah terekspresikan dalam epik etnis ini. Dalam perang sabil (parang sabil) Tausug membesarkan para sabilillah sebagai pahlawan karena mereka memotretnya sebagai orang yang mau untuk berkorban diri mereka demi keyakinannya atas nama Tuhan. Epik perang suci ini menyembah semua individu yang terlibat dalam perang suci ini. Kemudian, orang Moro yang mau bertarung sampai mati demi keyakinannya akan meninggal sebagai orang suci (*sabillillah*). Epik kepahlawanan ini sangatlah penting untuk diketahui ketika orang Moro sangat bersemangat bertarung melawan para kolonialis non-muslim seperti bangsa Spanyol, orang Amerika, dan bahkan melawan pemerintah pusat Filipina. Orang Moro berpandangan bahwa perjuangan dan pertarungan ini sebagai sebuah tanda kepahlawanan dan budaya. Faktanya, tradisi mereka menunjukkan gambaran positif orang Moro sebagai pencinta kebebasan dan pembenci berbagai bentuk intrusi asing. Hal ini merupakan citra historis orang Moro dan kebesaran orang Moro dalam sejarah kolonialis telah tertunjukkan dengan inspirasi hidup yang terlah diberikan dari akar Islamnya. Sebagaimana orang Moro dalam memeluk keyakinannya, mereka terpisah dari dunia yang lebih besar, Islam menawarkan dalam bahasa 'Darul Islam' atau 'ummah'. Dalam sekali waktu, kesadaran orang Moro menembus batas-batas etnisitas, geografi, dan menunjukkan tanda rasa sebagai komunitas. Mereka mencampuradukkan dua elemen dan menciptakan sebuah tradisi masyarakat Islami (Tan dalam Premdas *et. al.*, (ed.), 1990: 72-73).

Kombinasi nilai-nilai Islam dan tradisional telah menciptakan institusi politik baru. 'Kesultanan' (*sultanate*) sebagai institusi politik sebuah komunitas berdiri di atas 'datu' atau 'raja' Moro. Struktur politik memperbesar visi

politik orang Moro dan rasa kekuasaan jauh diatas 'ke-datuan' ataupun 'ke-rajah-an'. Datu atau rajah Moro dan para pengikutnya pada saat itu tunduk pada kekuasaan Sultan yang lebih tinggi dan memperlihatkan bahwa mereka telah menerima sistem kesultanan ini dianggap membawa mandat dibawah payung Islam sebagai 'representasi Tuhan'. Hal ini merupakan sumbangan terbesar Islam pada pemikiran orang Moro. Otoritas representasi Tuhan baru ini merupakan pemujaan atas apa yang telah mereka miliki karena hal ini memberikan mereka komitmen di luar mereka sendiri. Mereka menemukan ras keamanan yang lebih besar dalam sistem yang mempersatukan kemerdekaan dan seringkali bertentangan dengan kepemimpinan lokal ke dalam sebuah loyalitas yang sama. Lebih jauh lagi, identitas orang Moro yang baru ini akan berhadap-hadapan dengan tantangan dari kolonialisme dalam bentuk negara (George, 1980: 14-27; Tan in Premdas *et. al.*, (ed.), 1990: 74). Oleh karena itu, mereka melihat bahwa pemerintah Filipina merupakan keberlanjutan dari kolonialis seperti bangsa Spanyol dan Amerika. Tema ini akan didiskusikan nanti dalam sub-bab pendekatan negara terhadap gerakan Moro.

### 3. Identitas Orang Aceh

Aceh menunjuk pada salah satu propinsi di Indonesia yang dikenal sebagai Nanggroe Aceh Darussalam yang berlokasi di tepi paling utara dari pulau Sumatra Indonesia dan terkenal dengan julukan Serambi Mekah. Ironisnya, kenyataan di Aceh selama sekitar 130 tahun ditandai dengan perang yang hampir terus menerus, pemberontakan, dan represi. Dengan melalui sejarah, Aceh telah berkembang mempunyai identitas yang unik dan berjuang untuk mempertahankan status sejarahnya dalam kepulauan (Reid, 2006).

Pada masa lalu, Aceh merupakan daerah berkekuatan besar dengan sejarah yang terpisah dari sejarah Indonesia. Aceh merupakan titik masuk dalam daerah Islam di Asia Tenggara, dan sekarang orang-orang Aceh tersebut lebih bersifat ortodok dibanding dengan kebanyakan orang di Indonesia. Aceh diasumsikan lebih terkenal pada masa Sultan Iskandar Muda yang hidup dari tahun 1581-1636. Zaman itu merupakan masa keemasan Aceh pada abad ke-17, dengan dipimpin Sultan Iskandar Muda, Aceh melakukan ekspansi territorial besar-besaran serta terlibat dalam perdagangan rempah-rempah yang sangat penting, hampir sebanding dengan minyak pada masa ekonomi global sekarang. (Crow, 2000; Riddell dalam Reid, (ed.), 2006: 38-49).

Reid (2006) berargumen bahwa orang Aceh mempunyai pengalaman tersendiri dengan para kolonialis, mulai dari Kolonial Portugis pada abad 16 dan Kolonial Belanda pada abad 17. Pembentukan identitas orang Aceh dimulai lewat perjuangan bendera anti kolonial dengan menggunakan nilai-nilai Islam sebagai inti dari budaya politik mereka. Pada abad 16 dan 17, orang Aceh mengidentifikasi mereka sendiri sebagai 'Serambi Mekah'. Pada saat itu, orang Aceh terlibat dengan kekerasan yang merupakan katalis efektif

dalam pembentukan identitasnya. Kerajaan Aceh dan penguasa Ottoman Turki mempunyai hubungan yang sangat baik dengan adanya fakta bahwa mereka saling membantu satu sama lain atas nama solidaritas pan-Islamik. Bahkan Aceh mendapatkan bantuan dari Raja Sulayman di Constantine pada tahun 1563 untuk melawan orang Portugis. Reid memberikan fakta hubungan yang erat antara kerajaan Turki dengan Aceh dibawah bendera solidaritas kelompok Islam.

*The Sultan [of Aceh] says that he is left alone to face the unbelievers. They have seized some islands, and have taken Muslims captive. Merchants and pilgrim ships going from these islands towards Mecca were captured one night by the Portuguese and the ships that were not captured were fired upon and sunk, causing many Muslims to drown (Reid, 2006: 47).*

Lebih jauh lagi orang Aceh lebih kuat merasa sebagai orang Islam daripada mengedepankan sebagai sesama orang Melayu. Kuatnya sentimen sebagai orang Islam dibanding dengan sentimen sesama orang Melayu dikarenakan orang Aceh lebih merasa mempunyai hubungan yang erat dengan pusat umat Muslim di Mekah yang ditandai hubungan erat orang Aceh dengan kerajaan Ottoman Turki, sebagai pusat kerajaan Islam saat itu, dalam sejarah mereka.

Pada masa kolonial, pemerintah Hindia Belanda memanfaatkan kepala daerah dan uleebalang sebagai pendukung utama dan telah menyulut konflik dengan para Ulama di Aceh. Para ulama mulai menentang otoritas para ulebalang yang bersatu dengan kolonial Belanda. Lebih jauh lagi, pada masa penjajahan kolonial Jepang, para ulama didukung oleh Jepang karena mereka juga sama-sama melawan kolonial Belanda. Pada saat yang sama, kolonial Jepang menekan kelompok ulebalang (Reid, 2006: 96-107).

Dibawah periode kolonial Belanda, orang Aceh menulis literatur etnis melalui karya besar Hikayat Perang Sabil (HPS) atau lebih sederhana literatur ini bercerita mengenai jihad atau perang suci. HPS mempunyai lirik yang sangatlah penting yang digunakan oleh orang Aceh untuk melawan kolonialisme Belanda. Ini menunjukkan keterikatan orang Aceh dengan tradisi dan retorika perang suci yaitu sebuah kepercayaan yang telah sangat berakar diantara orang-orang Aceh (Alfian dalam Reid, (ed.), 2006: 117-119). Hal ini merupakan bahasa yang sama yang digunakan oleh komunitas Muslim Moro yang mengagung-agungkan kepahlawanan dari sabilillah, yang diambil dari bahasa Arab yang berarti orang yang berani mati demi agamanya. Orang Moro melihat hal ini sebagai seorang pahlawan yang berani mati sebagai satu-satunya jalan sebagai bentuk pengorbanan diri dalam mencapai keagungan tertinggi. Semangat untuk membunuh musuh yang bukan Muslim membawa penghargaan secara sosial dan spiritual. Dalam konteks ini, musuh-musuh yang dimaksud adalah para kolonialis yang non-muslim.

Kolonialis Belanda lambat laun namun pasti mengambil alih atas apa yang kemudian menjadi the Dutch East Indies, Aceh merupakan tambahan terakhir, dan yang paling lambat, dari kerajaan yang membentang besar itu. Pada tahun 1873, kolonialis Belanda mencoba menaklukkan provinsi ini, namun terhambat oleh apa yang mereka sebut dengan perlawanan yang paling terorganisir dan kuat yang pernah mereka tangani. Perang Aceh berakhir sampai pada awal abad ke 20, dengan serangan gerilya yang sporadis terus berlanjut setelah berakhirnya perang Aceh tersebut.

Invasi Jepang ke daerah Pasifik pada akhirnya berhasil menyingkirkan keberadaan kolonialis Belanda di Aceh, dan para tentara dan administrator Belanda masih belum juga menyingkir sampai akhir perang dunia ke dua (Reid 2006: 96-107). Aceh berpartisipasi sangat jauh dalam ikut membantu dalam kemerdekaan Indonesia melawan kolonial Belanda dari tahun 1945-1949. Namun begitu, kerusuhan dengan cepat terjadi di Aceh setelah kegagalan Indonesia dalam mengakomodasi Aceh untuk membuat provinsi tersendiri terpisah dari provinsi Sumatra Utara. Pada tahun 1950-an, pemberontakan Darul Islam meletus di sebagian pulau Jawa dan di Aceh. Darul Islam merupakan gerakan yang bertujuan membuat Indonesia menjadi sebuah negara Islam, namun gerakan ini tidak pernah membantu kemerdekaan bagi Aceh ataupun juga bagi provinsi lainnya. Gerakan Darul Islam terpisah di Aceh ketika para pemimpinnya terkooptasi ke dalam pemerintah dan ketika Aceh telah diberi status sebagai Provinsi Istimewa (Aspinall, 2007). Hal ini sama dengan apa yang terjadi dalam bahasa Moro dimana mereka juga menggunakan bahasa Darul Islam sebagai sebuah bahasa untuk mempersatukan komunitas Muslim ke dalam sebuah negara tersendiri.

Dari tahun 1960-an Aceh memasuki sebuah periode yang relatif damai, namun pada tahun 1976 Hasan di Tiro dan sekelompok kecil pendukungnya memproklamasikan kemerdekaan Aceh dari Indonesia. Di Tiro, yang telah hidup lama dalam pengasingannya di Swedia yang berprofesi sebagai seorang pengusaha sukses, merupakan keturunan sebuah keluarga Ulama Muslim terkenal dan merupakan cucu dari salah satu dari banyak pemimpin perang pada masa perlawanan terhadap kolonialis Belanda. Keluarga besar di Tiro merupakan bagian dari Kesultanan Aceh. Hasan di Tiro merupakan pendiri dari Front Pembebasan Nasional Sumatra/Aceh (*Aceh/Sumatra National Liberation Front*, ASNLF), yang kemudian lebih dikenal dengan nama Gerakan Aceh Merdeka (GAM, *Free Aceh Movement*) (Aspinall, 2007; Crow, 2000; Sulaiman dalam Reid, (ed.), 2006: 133-139). GAM dengan cerdas memanfaatkan strategi budaya politik dengan cara mengeksploitasi lirik Hikayat Perang Sabil (HPS) atau perang suci untuk menarik para calon pengikut GAM. GAM menggunakan lirik HPS dengan tujuan untuk mempengaruhi orang Aceh untuk mencitrakan penguasa Indonesia sebagai sama dengan kolonialis, Edward Aspinall menggunakan terminologi

'pemerintah kolonial Jawa', dalam mendemonisasi pendekatan Negara terhadap orang Aceh (Alfian dalam Reid, (ed.), 2006: 117-119). GAM, yang sangat memaksimalkan kampanye propaganda, berhasil menarik perhatian pemerintah pusat Indonesia.

Pada awal tahun 1980-an, sebagian besar GAM terpaksa berada dalam keterasingan, dengan 250 pengikut berangkat ke Libya untuk mendapatkan pelatihan. Libya dan GAM, akhir-akhir ini, telah menurunkan hubungan diantara keduanya; GAM tidak ingin dihubungkan kepada terorisme internasional, sementara itu Libya telah memutuskan untuk mendukung integritas wilayah Indonesia. Pada tahun 1989, banyak dari anggota GAM yang kembali ke Aceh, menyebarkan ancaman militer dan pada saat itu pula Indonesia mendeklarasikan darurat Militer, yang untuk sementara itu menghancurkan gerakan separatis ini. Namun, aktivitas militer dan polisi Indonesia pada tahun 1990-an yang menekan secara besar-besaran telah merubah opini publik-jika tidak untuk GAM, setidaknya untuk kemerdekaan mereka dari Indonesia (Aspinall, 2007). Orang Aceh melakukan pembentukan identitas mereka melalui proses-proses politik, sosial dan budaya, dengan nilai-nilai Islam di dalamnya yang tetap merupakan identitas yang esensial sebagai norma, keyakinan, dan nilai-nilai yang saling terbagi dalam komunitas orang Aceh.

### **Pendekatan Negara terhadap gerakan Pattani, Moro dan Aceh**

Orang-orang Patani, Moro, dan Aceh sekarang ini telah berada dalam negara yang sama sekali berbeda tujuannya. Mungkin ada yang berpendapat bahwa perbedaan tujuan secara ideologi politik antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara akan sama berbeda kebijakannya terhadap orang Patani, Moro, dan Aceh dari negara mereka masing-masing. Namun faktanya adalah bahwa orang Patani, Moro, dan Aceh telah diperlakukan dengan cara dan kebijakan yang sama, dengan tujuan untuk menghapuskan perbedaan identitas orang Aceh dan Moro dan cara hidup mereka. Pemerintah Thailand Filipina dan Indonesia berbagi asumsi yang sama mengenai karakter khusus dari negara bangsa. Adalah asumsi ini yang telah membentuk kebijakan-kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah Filipina dan Indonesia terhadap orang-orang minoritas etno-nasionalis.

Dalam konteks ini, Benedict Anderson (1983) menyatakan bahwa negara post-kolonial seperti Indonesia dilihat seperti keberlanjutan dari para kolonialis dimana pemerintah Indonesia sejak kemerdekaannya pada tahun 1945 sampai periode Orde Baru menggunakan pendekatan negara dengan fungsi-fungsinya dalam menghadapi masyarakatnya sendiri. Karena itu, pemerintah Indonesia menggunakan aparat negara dan kebijakan-kebijakannya untuk mengamankan kepentingan negara dan mengabaikan

kepentingan sebagai sebuah bangsa. Birokrasi dan yang lebih penting lagi adalah militer memainkan peranan yang sangat penting dalam mengamankan kepentingan negara tersebut.

Pada konteks ini, jelaslah bahwa pemerintah Indonesia sebagai negara yang multi-etnis berada dalam keadaan yang berbahaya karena apabila pemerintah pusat Indonesia tetap menggunakan pendekatan negara tanpa mempertimbangkan kepentingan bangsa, maka Indonesia akan menghadapi lebih banyak lagi gerakan nasionalis yang menginginkan untuk memisahkan diri. Orang Aceh (sebelum perjanjian Helsinki) dan gerakan Papua Merdeka berada di persimpangan untuk memisahkan diri dari Indonesia atau tetap berada di dalam Indonesia. Adalah Anderson yang memberikan alat analisis untuk mengkaji negara-negara post-kolonial yang cenderung menggunakan kepentingan negara untuk menyatukan negara bangsa mereka sebagai satu identitas yang sama. Namun di sisi lain, negara-negara bangsa ini mengabaikan kepentingan sebagai bangsa. Hasil dari kebijakan-kebijakan ini adalah adanya konflik berdasarkan identitas yang dianut oleh masing-masing kelompok seperti gerakan Moro yang berhadap-hadapan dengan pemerintah pusat Filipina dan gerakan Aceh yang berhadap-hadapan dengan Pemerintah pusat Indonesia.

### **1. Pendekatan Negara Thailand**

Pendekatan yang menggunakan pendekatan negara dilakukan oleh penguasa Thailand dengan menggantikan penguasa kesultanan menjadi penguasa Budha yang beretnis Thai telah memicu pendekatan yang represif dari penguasa Budha di Thailand sehingga memunculkan kelompok-kelompok oposisi. Gerakan oposisi pertama yang terkenal atas penaklukan oleh orang Siam adalah yang dipimpin oleh Tengku Abdul Kadir, yang merupakan Sultan Patani terakhir, yang merupakan resistensi pasif pada tahun 1903. Penangkapan Tengku dan pelepasannya pada tahun 1906 menyebabkan pemberontakan dan provokasi meningkat namun Bangkok tetap menguasai kerusuhan politik tersebut.

Pada tahun 1910 pemberontakan dilakukan oleh Sheikh Sufi (To'tae dan Haji Bula) yang mengumandangkan Jihad untuk melawan pemerintah kafir Siam dengan cara mengangkat senjata, namun akhirnya mereka ditangkap oleh militer. Pada tahun 1915 Abdul Kadir yang merupakan pemimpin Patani menolak keras pajak yang diminta oleh pemerintah pusat Thailand dalam sebuah protes menentang reformasi pendidikan yang diperkenalkan oleh pemerintah pusat Thailand. Kemudian tahun 1921 Undang-Undang pendidikan dasar yang wajib bagi semua anak-anak untuk mengikuti sekolah dasar negara selama empat tahun untuk mempelajari bahasa Thai. Aturan ini ditegakkan secara tegas dan mendapatkan tantangan Muslim Melayu yang dianggap merupakan sebuah tantangan serius atas budaya lokal, agama, dan

bahasa mereka. Sekolah negara tidak hanya mengajarkan sekularisme, namun juga pelajaran etika Budha dengan pendeta Budha sebagai guru mereka.

Hal ini secara langsung menohok *ponoh* yang juga bergerak sebagai institusi pendidikan dasar yang bernuansakan agama Islam dan Melayu. Selain juga berimplikasikan atas keberlangsungan kekuatan ekonomi atas *ponoh* yang juga bergerak untuk memajukan secara sosial ekonomi para guru agama lokal. Para guru secara efektif memobilisasi masyarakat untuk menentang kebijakan reformasi pendidikan tersebut yang memaksakan ajaran Budha pada komunitas minoritas Muslim Patani dan dengan tujuan akhir membuat orang Muslim Patani menjadi orang Thailand dengan mengharuskan bahasa Thai dan agama Budha.

Protes dilakukan dengan sangat massif di daerah selatan Thailand ini dengan menolak untuk datang dan bersekolah di sekolah Negara yang telah disediakan dan bahkan diwajibkan oleh penguasa Negara Thailand. Pemerintah pusat Thailand secara terus menerus menekan orang-orang Patani dan bahkan dengan cara-cara militer.

Pada kondisi kekinian, pemerintah pusat Thailand tetap memberlakukan kebijakan asimilasi dengan mengintegrasikan Patani ke dalam Negara Thailand dengan cara memaksakan kehendak untuk merubah identitas mereka sebagai orang Muslim dan Melayu. Strategi berikutnya adalah dengan cara melakukan demonisasi atas gerakan patani dengan cara mengambil keuntungan atas isu global yang berkembang setelah kejadian serangan terorisme di Amerika Serikat pada 11 September 2001 dan dengan cepat pula mereka membuat label baru pada gerakan Patani yaitu sebagai kelompok teroris Islam (International Crisis Group, 2005).

## 2. Pendekatan Negara Filipina

Negara-negara kontemporer di Asia Tenggara sebagian besar merupakan negara kelanjutan dari negara bentukan para kolonialnya yang ditinggalkan para kolonialis Eropa. Negara Filipina merupakan salah satu negara yang juga melanjutkan perilaku para bekas kolonialis Eropa dan Amerika Serikat dengan melakukan tekanan represif terhadap gerakan Moro dengan kebijakan asimilasi identitas lokal Moro kepada identitas nasional yang berujung pada konflik berbasis sentimen etno-nasionalis.

Tindakan-tindakan kasar dari pemerintah nasional untuk mengasimilasikan orang Moro dibawah retorika inklusifisme Filipinisasi hanya menghasilkan lawan yang pada awalnya merupakan sebuah gerakan yang relatif moderat (McKenna, 1998; Yegar, 2002). Secara historis, orang Moro telah menikmati tingkat otonomi yang sangat luas dari Manila di bawah penjajahan kolonial Amerika Serikat. Inti dari sejarah ini adalah ketika orang-orang dari daerah Sulu, Lanao, dan Maguindanao bersatu dibawah

datu propinsi yang besar yaitu Moroland yang diperintah oleh para tentara Amerika Serikat. Hal ini bahkan menarik para penulis untuk menggambarkan daerah tersebut sebagai 'sebuah rejim dalam rejim' (McKenna, 1998).

Puncak dari program sentralisasi administrasi dibawah rejim Marcos merupakan poin penting sebagai perasaan yang sangat pahit yang mengarahkan kelompok politik oposisi kepada asimilasi yang berujung pada perlawanan bersenjata atas retorika dukungan etno-nasionalis Bangsa Moro. Retorika ini diterima oleh kebanyakan orang Moro seperti yang direspon oleh kediktatoran dengan serangan militer besar-besaran melawan mereka yang berani menentang agenda dari presiden Marcos. Bersamaan dengan ini adalah sebuah emaskulasi politik pemilihan pemimpin lokal dengan merekayasa, *gerrymending*, wilayah-wilayah dengan cara-cara tertentu menggunakan para pendatang beragama Kristen yang perlahan-lahan menyingkirkan populasi Muslim dari daerah tersebut. Strategi kebijakan sosiopolitik dari rejim kediktatoran justru menyulut perasaan dari orang Moro yang melihat hal ini sebagai taktik imperial yang menghina identitas mereka sebagai budaya yang berbeda secara sejarah.

Irredentisme, separatisme, atau bahkan otonomi telah menjadi pertempuran yang menyedihkan atas banyak orang Muslim di Mindanao. Beragam tanggapan yang datang dari pemerintah Filipina merupakan sesuatu yang mengherankan. Mereka sangat berbeda dari satu rejim ke rejim yang lain. Yang mudah dikenal, rejim Ferdinand Marcos dan Joseph Estrada yang kekuasaannya banyak bersumber pada kharisma mereka, yang paling banyak tingkat kekerasannya sepanjang sejarah. Pernyataan dari pasangan pemimpin kharismatik sebuah negara bangsa dengan skema sentralisasi pada akhirnya berkontribusi atas eskalasi kekerasan.

Dampak mendalam dari serangan 9 September (9/11) terhadap Amerika Serikat telah mempenetrasi pada hampir semua disiplin dalam ilmu-ilmu mengenai manusia. Wacana terorisme tiba-tiba menjadi pembeda di mana para analis secara berkelanjutan bersaing satu sama lain. Satu sisi dapat mengartikulasikan sebuah teori yang khusus atau yang sangat luas untuk satu agenda yang lebih lanjut melalui sebuah *modality*. Apa yang sudah jelas adalah munculnya para separatis, pemberontak, dan para bandit semua secara bersamaan tertransformasikan menjadi para teroris (Dangzalan, 2006). Walaupun hal ini tidak dapat diukur dalam waktu satu hari, transformasi ini cukup cepat untuk mengejutkan kelompok-kelompok ini walaupun fakta ini cukup pintar untuk diinternalisasi oleh masyarakat secepat mungkin. Kebijakan pembangunan dan keamanan sebagai sebuah arena yang tersatukan merupakan memanifestasikan dirinya di Mindanao. Program dari Pertumbuhan dari Kesetaraan di Mindanao (GEM, *Growth with Equity in Mindanao*) yang selalu ada dalam iklan yang selalu tercetak setiap hari minggu (Dangzalan, 2006).

Gerakan politik bersenjata Moro dilihat sebelumnya sebagai sebuah gerakan separatisme. Terminologi “teroris” sangatlah jarang digunakan untuk mendepiksikan aksi gerakan dari kelompok-kelompok tersebut. Bahkan dengan cara-cara yang misterius gerakan Abu Sayyaf dilihat sebagai kelompok Bandit sebagai kelompok yang bersebrangan dalam memandang NPA sebagai gerakan yang lebih revolusioner dan MILF dan MNLF sebagai gerakan separatis. Homogenisasi kelompok-kelompok ini dalam kolom struktur terorisme sebagai realitas sosial dengan cara-cara tertentu yang menjadi pandangan yang bersifat prasangka terhadap isu tersebut sepertinya mereka ingin memperlihatkan gambaran yang diinginkan untuk dilihat oleh kita. Secara spesifik, Muscati (2003) membicarakan mengenai homogenisasi Islam sebagai sesuatu yang ‘jahat’ yang berbeda dengan tradisi umat Kristen dengan adanya serangan teroris di Amerika Serikat.

### 3. Pendekatan Negara Indonesia

Sementara itu, di Indonesia sebelum dan sesudah serangan 09 September 2001 di Amerika Serikat, kemerdekaan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) hanya dianggap sebagai gerakan separatis saja. Pemerintah Indonesia lebih bersifat defensif daripada ofensif seperti pemerintah Filipina dalam melakukan pendekatan terhadap gerakan etnonasionalis. Pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan yang lebih halus dengan bernegosiasi dengan GAM atau gerakan Aceh untuk mengintegrasikan daerahnya, khususnya setelah bencana tsunami pada tanggal 26 Desember 2004.

Namun, pemerintah Indonesia tetap menggunakan tindakan militer dalam berhadapan dengan GAM dan berlanjut sampai periode pasca Soeharto. Faktanya, pada bulan Mei 2003, Jenderal Ryamizard Ryacudu dalam penjelasannya kepada para jurnalis bahwa tentara Indonesia mau untuk merubah tindakan ofensif mereka dalam berhadapan dengan GAM demi keutuhan negara Indonesia. Jenderal Ryamizard Ryacudu, seperti diberitakan dalam Kompas, menekankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai harga final atas isu separatisme ini. Dalam pandangan ini, melalui perjalanan historis, kesatuan nasional Indonesia telah diakhiri pada tahun 1928 ketika para pemuda dari seluruh wilayah Indonesia bertemu di Jakarta dan kemudian bersumpah mengakui bahwa mereka “bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, Indonesia” ([www.kompas.com](http://www.kompas.com), 14 Mei 2003, diakses 18 Desember 2007).

Bagi Jenderal ini, sumpah ini adalah identitas yang tidak dapat digantikan bagi semua warga negara Indonesia. karena itu, sejarah orang Aceh, yang bergabung dengan semua wilayah Indonesia, berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dalam pandangan Ryamizard Ryacudu merupakan sebuah penghianatan atas sumpah ini, sebuah identitas yang telah dinetralisasi, dia

menyebut pemberontakan Aceh ini sebagai “Orang-orang dari Republik Indonesia, namun nakal” (www.kompas.com, 14 Mei 2003, diakses 18 Desember 2007). Hal ini berarti bahwa pandangan militer Indonesia pada masa pasca Soeharto mengidentifikasikan mereka sendiri sebagai penjaga kesatuan nasional. Sebelum bencana tsunami di Aceh pada 26 Desember 2004, perang di Aceh sangat jelas tidak akan pernah berakhir. Pemerintah pusat Indonesia di Jakarta tidak mempunyai alternatif penyelesaian lain terhadap gerakan orang Aceh selain dari tindakan represif militer Indonesia. Represi tersebut tampaknya telah menyulut lebih banyak lagi perlawanan bersenjata orang Aceh.

Secara historis, pada masa setelah kemerdekaan Indonesia, orang Aceh diberikan status “daerah khusus” dalam republik Indonesia dengan adanya otonomi khusus. Di bawah pemerintah Indonesia, Aceh terdeprivasi karena kepemimpinan pemerintah pusatnya. Pada tahun 1953 gerakan Darul Islam yang dipimpin oleh Gubernur Daud Bereuh, diikuti oleh pemberontakan Aceh, yang mendeklarasikan kemerdekaan Aceh pada tahun 1953. Pada tahun 1959, Aceh diberikan status “wilayah khusus” ditandai dengan adanya otonomi dalam urusan-urusan keagamaan dan pendidikan, dan hukum. Akan tetapi, pemerintah pusat di Jakarta tidak pernah memenuhi jajinya atas status khusus ini secara nyata (Crow, 2000).

Pada tahun 1976, Teungku Hasan Muhammad di Tiro memimpin Front Pembebasan Nasional Sumatra Aceh (*Aceh Sumatra National Liberation Front*, ASNLF) dengan mendeklarasikan Aceh sebagai negara yang merdeka. Militer Indonesia langsung menghancurkan gerakan ini dengan cepat. Lebih jauh lagi, pada tahun 1989, militer Indonesia melalui Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh mencoba untuk menyingkirkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM/ASNLF). Pemerintah pusat Indonesia memobilisasi militer untuk menginstitusionalisasi negara dan merupakan serangan balik atas pemberontakan GAM. Pasukan keamanan, dalam usahanya untuk menyingkirkan dengan kuat para anggota GAM, terlibat urusan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Banyak sekali warga sipil yang meninggal dan disiksa, dan desa-desa yang disangkakan terhubung dengan GAM secara sistematis menjadi target serangan militer (Sulaiman dalam Reid (ed.), 2006: 121-139).

Sampai pada periode kejatuhannya Soeharto pada bulan Mei 1998, banyak orang Aceh melihat sesuatu dengan kemarahan terhadap militer Indonesia. Pada periode reformasi ini, tuntutan populis untuk otonomi yang lebih luas atau kemerdekaan menjadi sangat nyaring terdengar. Tuntutan atas gaya referendum yang sudah dilaksanakan di Timor Timur pada tahun 1999 telah mencapai puncaknya pada tahun tersebut, yang disulut oleh berbagai macam faktor, termasuk janji yang tidak dipenuhi oleh Presiden Indonesia saat itu; terlalu banyaknya publikasi pembunuhan oleh militer Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya; dan diperbolehkannya referendum di Timor

Timur oleh pemerintah Indonesia, meningkatkan harapan orang Aceh untuk kejadian yang mirip akan sangat mungkin terjadi di Aceh (Schulze dalam Reid, 2006: 236-238).

Akan tetapi, referendum di Aceh tidak pernah terjadi. Pemerintah Indonesia malah hanya memberikan 'otonomi khusus' setelah masa reformasi dan memulai pendekatan baru melalui negosiasi. Strategi kebijakan ini membawa orang Aceh pada ingatan di masa lalunya dengan kebijakan yang sama yang terjadi pada tahun 1950-an yang tidak pernah dipenuhi oleh pemerintah Indonesia. Karena itu, GAM kemudian mencari dukungan internasional. setelah tragedi 09 September di Amerika Serikat, GAM hampir saja dimasukkan dalam daftar kelompok-kelompok teroris oleh Amerika Serikat. Walaupun GAM tidak secara langsung berpartisipasi dalam penyerangan teroris yang terhubung dengan Al-Qaeda, namun GAM mempunyai kontak dengan sejumlah organisasi yang terhubung dengan jaringan Al-Qaeda. Terlebih lagi, aktivitas pemberontakan dan teroris GAM, termasuk penyelundupan senjata, pencucian uang, dan latihan perang, turut berkontribusi secara ekonomi pada jaringan regional teroris. sebuah perjanjian damai akan membuat lubang pada jaring laba-laba dari hubungan teroris di Asia Tenggara (Dillon, 2005).

Secara tiba-tiba, bencana tsunami datang memupus harapan bahwa GAM akan berekonsiliasi dengan Indonesia. Gelombang tsunami tersebut telah menghancurkan pantai Sumatra dan membunuh sekitar 130.000 orang Aceh. GAM dengan cepat meminta gencatan senjata dengan TNI, yang dengan sendirinya TNI menyediakan bantuan yang penting dalam usaha pemulihan setelah bencana tsunami tersebut. Segera setelah tragedi itu, negosiasi antara kelompok militer dan kelompok bersenjata GAM semakin intensif dan kemauan yang lebih terlihat jelas, dari kedua belah pihak, untuk mencapai suatu perjanjian damai yang tetap. Situasi setelah tsunami telah membawa pada kondisi yang berbeda dari gerakan Aceh dan pemerintah pusat Indonesia melalui militernya. pada periode sebelumnya, kelompok GAM menuntut kemerdekaan bagi Aceh; dalam proposal perdamaian kekinian, GAM kemudian bersepakat untuk menerima otonomi di dalam negara Indonesia. Pada gilirannya, Indonesia kemudian memberikan GAM hak untuk membentuk partai politik lokal. kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan negosiasi di Helsinki, Finlandia (Dillon, 2005).

## **Kesimpulan**

Identitas tampaknya menjadi sangatlah penting khususnya pada kondisi kekinian. Pembentukan identitas melalui sejarah dan geografi telah menunjukkan dinamikanya dalam pembentukannya. Dalam kasus negara-negara pasca Kolonial di kawasan Asia Tenggara, pembentukan identitasnya adalah melalui perjalanan panjang sejarah. Identitas gerakan nasionalis

Patani, Moro, dan orang Aceh dibentuk melalui hubungannya dengan para pedagang Arab, China, India, dan Eropa. Lebih jauh lagi, nilai-nilai Islam menempati peranan penting untuk menjadi nilai-nilai utama dari identitas orang Patani, Moro dan Aceh. Faktanya, nilai-nilai Islami dapat berasimilasi dengan budaya tradisional pada periode sebelum masuknya Islam. Pengaruh lainnya datang dari para kolonialis Eropa yang menantang budaya tradisional dan Islam. Karena itu, gerakan Patani, Moro di Filipina dan orang Aceh di Indonesia menjadi percampuran budaya dan kemudian menciptakan tampilan unik dari identitas ketiga kelompok ini. Keunikan identitas mereka dapat dilihat dari struktur sosialnya.

Pendekatan negara di ketiga negara ini tampaknya hanya menemukan jalan buntu. Kebuntuan ini dikarenakan kebijakan mereka yang mamaksakan identitas penguasa yang dominan di masing-masing negara, sehingga proses asimilasi yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah pusat justru memupuk semakin luasnya separatisme. Kemudian, pendekatan negara ini tampaknya hanya mengikuti jejak para kolonialis yang pernah menjajah di Asia Tenggara ini yang juga berdampak sama seperti yang terjadi pada para kolonialis tersebut, yaitu gagalnya pemerintah tersebut untuk mengakomodasi identitas minoritas dalam sebuah negara bangsa yang bersifat multi-etnik di Asia Tenggara. Melihat fakta tersebut, maka pemerintah Thailand, Filipina, dan Indonesia harus menggunakan pendekatan sebagai sebuah bangsa yang multikultural (*multicultural nation approach*). Dengan pendekatan ini, maka sebuah negara bangsa seperti Thailand, Filipina dan Indonesia akan dapat mengakomodasi keberagaman identitas yang ada di dalamnya dalam kesetaraan. ●

## Referensi

- Alfian, I. T. 2006. "Aceh and the Holy War (*perang sabil*)". Dalam A. Reid (Ed.), *Verandah of Violence: The Background to the Aceh Problem*. Seattle, USA: University of Washington Press.
- Anderson, O'G. R. B. 1983. Old State, New Society: Indonesia's New Order in Comparative Historical Perspective. *Journal of Asian Studies*, 42 (3), 477-496.
- Aspinall, E. 2006. Violence and Identity Formation in Aceh under Indonesian Rule. Dalam A. Reid (ed.), *Verandah of Violence: The Background to the Aceh Problem*. Seattle, USA: University of Washington Press.
- Aspinall, E. 2007. From Islamism to Nationalism in Aceh, Indonesia. *Journal of Nations and Nationalism*, 13 (2), 245-263.
- Castells, M. 1997. *The Power of Identity*. Oxford, UK: Blackwell Publishers.
- Cooley, J. 2002. *Unholy Wars: Afghanistan, America and International Terrorism*. London: Pluto Press.
- Crow, D. K. 2000. Aceh-The 'Special Territory' in North Sumatra: A Self-

## Fulfilling

- Promise? *Journal of Muslim Minority Affairs*, 20 (1), 91-104.
- Dangzalan, J. L. 2006. Transforming Separatists Into Terrorists: Representations of the "Moro" Ethnic Insurgency. *First ASEAN Graduate Student Forum on Southeast Asia Studies* (pp. 1-13). Singapore: Asia Research Institute NUS.
- Delanty, G., & Kumar, K. (Eds.). 2006. *The SAGE Handbook of Nations and Nationalism*. London, UK: SAGE Publications.
- Dillon, R. D. 2005. *Peace in Aceh: What It Means or the U.S.*, di [www.heritage.org/Research/AsiaandthePacific/wm806.cfm](http://www.heritage.org/Research/AsiaandthePacific/wm806.cfm), Diakses 7 November 2007.
- Dosch, J. 2007. *The Changing Dynamics of Southeast Asian Politics*. Boulder London, UK: Lynne Rienner Publishers.
- George, S. J. T. 1980. *Revolt in Mindanao: The Rise of Islam in Philippines Politics*. London, UK: Oxford University Press.
- Hearn, J. 2006. *Rethinking Nationalism: A Critical Introduction*. New York, USA: Palgrave Macmillan.
- Kompas. 2003. *KSAD Jenderal Ryamizard Ryacudu: TNI minta maaf pada rakyat Aceh*, Kompas, 14 May. <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0305/14/nasional/312694.htm>, diakses 18 Desember 2007.
- Korostelina, V. K. 2007. *Social Identity and Conflict: Structures, Dynamics, and Implications*. New York, USA: Palgrave Macmillan.
- Mackerras, C. (Ed.). 2003. *Ethnicity in Asia*. London, UK: Routledge Curzon.
- McFerson, M. H. (Ed.). 2002. *Mixed Blessing: The Impact of the American Kolonial Experience on Politics and Society in the Philippines*. London, UK: Greenwood Press.
- McKenna, M. T. 1998. *Muslim Rulers and Rebels: Everyday Politics and Armed Separatism in the Southern Philippines*. Berkeley, USA: University of California Press.
- McKinnon, E. E. 2006. Indian and Indonesian Elements in Early North Sumatra. Dalam A. Reid (Ed.), *Verandah of Violence: The Background to the Aceh Problem*. Seattle, USA: University of Washington Press.
- Malesevic, S. 2006. *Identity as Ideologi: Understanding Ethnicity and Nationalism*. New York, USA: Palgrave Macmillan.
- Muscati, A. S. 2003. Reconstructing 'evil': A Critical Assessment of Post-September 11 Political Discourse. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 23 (2), 249-269.
- Nuryanti, Sri. 2003. In Search of Local Identity of Pattani. *Indonesian API Fellow Seminar*. Indonesia: Indonesian Institute of Sciences (LIPI).
- Pape, A. R. 2006. Suicide Terrorism and Democracy: What We've Learned Since 9/11. *Policy Analysis*. CATO Institute, No. 582, (November 1, 2006), pp. 1-18.

- Premdas, R. R., Samarasinghe, de A. R.W.S., & Anderson, B. A. (Eds.). 1990. *Secessionist Movement in Comparative Perspective*. New York, USA: St. Martin's Press.
- Research Center for Regional Resources Indonesian Institute of Sciences. 2004. *Multiculturalism, Separatism and Nation State Building in Thailand*. Jakarta, Indonesia: PSDR-LIPI.
- Reid, A. (Ed.). 2006. *Verandah of Violence: The Background to the Aceh Problem*. Seattle, USA: University of Washington Press.
- Riddell, G. P. 2006. Aceh in the Sixteenth and Seventeenth Centuries: "Serambi Mekkah" and Identity. Dalam A. Reid (ed.), *Verandah of Violence: The Background to the Aceh Problem*. Seattle, USA: University of Washington Press.
- Schulze, E. K. 2006. Insurgency and Counter-Insurgency: Strategy and the Aceh Conflict, October 1976-May 2004. Dalam A. Reid (ed.), *Verandah of Violence: The Background to the Aceh Problem*. Seattle, USA: University of Washington Press.
- Sulaiman, I. M. 2006. From Autonomy to Periphery: A Critical Evaluation of the Acehese Nationalist Movement. Dalam A. Reid (ed.), *Verandah of Violence: The Background to the Aceh Problem*. Seattle, USA: University of Washington Press.
- Tan, H.T. A. 2006. *Southeast Asia: Threats in the Security Environment*. Singapore: Marshall Cavendish Academic.
- Yegar, M. 2002. *Between Integration and Secession: The Muslim Communities of the Southern Philippines, Southern Thailand, and Western Burma/Myanmar*. Maryland: Lexington Books.